

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penatausahaan keuangan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses Pengelolaan Keuangan Daerah, baik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 maupun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Penatausahaan keuangan daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah, memegang peranan penting dalam proses keuangan daerah secara keseluruhan. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Dalam struktur pemerintahan daerah, satuan kerja (SKPD) merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi pendapatan, belanja, aset dan selain kas yang terjadi di lingkungan satuan kerja. Proses pencatatan tersebut dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dan pada akhir periode dari catatan tersebut PPK SKPD menyusun laporan keuangan untuk satuan kerja bersangkutan.

Peraturan mengenai penatausahaan keuangan daerah mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yaitu antara lain UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan daerah yang juga menjadi payung hukum penatausahaan keuangan daerah tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 78 Tahun 2008 yang telah mengalami perubahan menjadi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Beberapa aspek pelaksanaan yang perlu diperhatikan adalah pemberian peran dan tanggung jawab yang lebih besar para pejabat pelaksana anggaran, sistem pengawasan pengeluaran dan sistem pembayaran, manajemen kas dan perencanaan keuangan, pengelolaan piutang dan utang, pengelolaan investasi, pengelolaan Barang Milik Daerah, larangan penyitaan Uang dan Barang Milik Daerah dan/atau yang dikuasai negara/daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD, serta akuntansi dan pelaporan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- (1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD.
- (2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
 - b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

- c. melakukan verifikasi SPP;
 - d. menyiapkan SPM;
 - e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. melaksanakan akuntansi SKPD; dan
 - g. menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- (3) PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga merupakan bagian dari Satuan Perangkat Kerja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang melaksanakan penatausahaan keuangan daerah yang masih memiliki kelemahan dalam prosedur penatausahaan keuangan yang dijalankan, Belum adanya sistem informasi penatausahaan keuangan daerah tingkat SKPD, terlebih dalam hal penanganan penjumlahan dan control anggaran, sehingga harus dikerjakan manual, mengakibatkan fungsi verifikasi tidak optimal sehingga laporan keuangan tidak dapat disajikan sewaktu-waktu dan rentan terjadi kesalahan.

Komputerisasi manajemen pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan memudahkan pimpinan dalam mengontrol perkerjaan. Kontrol langsung dari atasan akan dapat meningkatkan efisiensi kerja dan juga dapat meningkatkan etos kerja pegawai karena merasa diperhatikan oleh atasannya.

Ditinjau dari permasalahan di atas, maka dengan adanya Sistem Informasi Manajemen Penatausahaan Keuangan SKPD (SIM PPK SKPD), diharapkan tersedianya Sistem Informasi Penatausahaan Keuangan tingkat SKPD, yang dapat dioperasikan oleh segenap aparatur di BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan SKPD lain, terkait dengan proses penatausahaan keuangan tingkat SKPD (PPK SKPD).

1.2. Perumusan Masalah

Penatausahaan keuangan tingkat SKPD yang masih belum terkomputerisasi dengan baik menyebabkan kelemahan keamanan data-data laporan keuangan juga belum mampu terintegrasi dengan baik pada sistem penyelenggaraan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka pokok permasalahan dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana mempermudah kontrol anggaran agar dapat digunakan sebagai alat bantu verifikasi?
2. Bagaimana merancang aplikasi terstruktur sesuai dengan urutan proses dan dokumen akuntansi yang dapat mengakomodir proses peñatausahaan keuangan tingkat SKPD menuju transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat penerapan SIM PPK SKPD?

1.3. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya dibatasi pada masalah verifikasi SPJ (dalam hal kontrol anggaran), penginputan akun-akun yang terjadi dalam sebuah transaksi keuangan, pembuatan jurnal, buku besar pembantu, buku besar sampai dengan Neraca Saldo pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah menggambarkan cara mengumpulkan informasi atau data yang diperlukan sebagai bahan dalam penyusunan ini adalah sebagai berikut :

a. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu melakukan pengumpulan data-data dengan menggunakan cara :

1) Metode Pengamatan Lapangan (*Observasi*)

Kegiatan ini dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan langsung atas apa yang sedang dikerjakan yang berkaitan dengan proses penatausahaan keuangan tingkat SKPD dan mempelajari dokumen-dokumen yang digunakan sebagai laporan.

2) Metode Wawancara (*Interview*)

Mempelajari dan menganalisa sistem yang sedang berjalan serta mendapatkan data langsung dari sumbernya dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan. Wawancara juga diharapkan dapat memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga apabila bias direncanakan dengan sempurna maka bias dilakukan dengan penuh kesungguhan.

3) Studi Kepustakaan (*Dokumentasi*)

Dilakukan dengan cara menggunakan beberapa buku panduan yang sangat menunjang yang sifatnya tidak rahasia berkaitan dengan penatausahaan keuangan daerah tingkat SKPD

b. Analisa Sistem

Salah satu pendekatan pengembangan sistem adalah pendekatan Analisa Object Oriented. Pendekatan Object Oriented dilengkapi dengan alat-alat teknik pengembangan sistem sehingga hasil akhirnya akan didapat sistem yang object orientednya didefinisikan dengan baik dan jelas. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah :

- 1) Menganalisa sistem yang ada yaitu memahami proses sistem yang sedang berjalan guna mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada.
- 2) Analisa dokumen yaitu menspesifikasikan masukan yang digunakan, database yang ada, proses yang dilakukan dan keluaran yang dihasilkan guna memahami kebutuhan akan dokumen – dokumen baru

Penulis menggunakan beberapa diagram *Unified Modeling Language* (UML) sebagai alat bantu untuk mendeskripsikan proses bisnis sistem yang sedang berjalan serta mendeskripsi konsep sistem baru yang akan dikembangkan dimana sistem baru tersebut tentunya dapat memberikan solusi solusi dari permasalahan yang ada serta memenuhi kebutuhan sistem. Beberapa analisa sistem dalam definisi diagram yang digunakan adalah :

a) Activity Diagram

Activity Diagram digunakan untuk memodelkan alur kerja atau workflow sebuah proses bisnis dan urutan aktifitas di dalam suatu proses.

b) Analisa Keluaran Sistem Berjalan

Analisa Keluaran merupakan analisa mengenai dokumen – dokumen keluaran yang dihasilkan dari sebuah sistem dari sebuah sistem yang sedang berjalan

c) Analisa Masukan Sistem Berjalan

Analisa Masukan merupakan analisa mengenai dokumen – dokumen masukan yang dihasilkan dari sebuah sistem yang sedang berjalan

d) Package Diagram

Package Diagram merupakan model – model elemen dari sistem dimana model tersebut saling ketergantungan satu sama lain

e) Usecase Diagram

Use Case Diagram digunakan untuk menjelaskan manfaat sistem jika dilihat menurut pandangan orang yang berada diluar sistem atau actor. Use Case Diagram juga merupakan deskripsi fungsi sistem yang akan dikembangkan

f) Deskripsi Use Case

Deskripsi Use Case digunakan untuk menjelaskan setiap use case yang dipakai dalam sistem yang diusulkan.

c. Perancangan Sistem

Tahap perancangan sistem adalah merancang sistem secara rinci berdasarkan hasil analisa sistem yang ada sehingga menghasilkan model sistem baru yang ada agar menghasilkan model baru yang diusulkan dengan disertai rancangan database dan spesifikasi program. Alat bantu yang digunakan penulis dalam perancangan sistem adalah :

1) Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antara data store yang ada dalam diagram arus data.

- 2) Transformasi ERD ke LRS
Transformasi ERD ke LRS merupakan sebuah model sistem yang digambarkan dari sebuah ERD yang mengikuti pola pemodelan ke LRS
- 3) Logical Record Structure (LRS)
Logical Record Structure berasal dari setiap entity yang diubah ke dalam bentuk sebuah kotak dengan nama entity berada di luar kotak dan atribut berada di dalam kotak.
- 4) Transformasi LRS ke Relasi/Tabel
Transformasi LRS Relasi / Tabel digunakan untuk mendefinisikan dan mengilustrasikan model konseptual secara terperinci dengan adanya primary key dan foreign key.
- 5) Spesifikasi Basis Data
Spesifikasi Basis Data digunakan untuk menjelaskan tipe data yang ada pada model konseptual secara detail.
- 6) Rancangan Dokumen Keluaran
Rancangan Dokumen Keluaran merupakan informasi yang akan dihasilkan dari keluaran siste yang akan dirancang
- 7) Rancangan Dokumen Masukan
Rancangan Dokumen Masukan merupakan informasi yang akan dihasilkan dari masukan sistem yang akan dirancang
- 8) Rancangan Layar Program
Rancangan Layar Program merupakan bentuk tampilan sistem layar computer sebagai antar muka dengan pemakai yang akan dihasilkan dari sistem yang dirancang.
- 9) Sequence Diagram
Sequence Diagram merupakan diagram yang secara khusus bergantung dengan use case diagram dengan memperlihatkan yang terjadi tahap demi tahap untuk menghasilkan sesuatu dalam use case tersebut.

10) Class Diagram

Class Diagram digunakan untuk menggambarkan kelompok objek – objek dengan atribut (property), perilaku (operation) dan relasi yang sama.

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk menangani proses penatausahaan keuangan tingkat SKPD agar berjalan efektif dan efisien. Disamping isu sistem pencatatan diatas, isu penting lainnya dalam akuntansi pemerintahan adalah basis pencatatan yang digunakan (basis kas atau basis akrual). Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 24/2005) basis pencatatan yang digunakan adalah *cash towards accrual*. Dengan basis pencatatan ini, untuk realisasi pendapatan, belanja, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dicatat berdasarkan basis kas, sedangkan untuk mencatat aset, kewajiban dan ekuitas dicatat berdasarkan basis akrual. Dalam pelaksanaan basis pencatatan ini dikembangkan teknik jurnal yang disebut jurnal korolari, dimana jurnal korolari ini tidak ditemukan dalam akuntansi komersial.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diambil oleh penulis dalam pengelolaan data penatausahaan keuangan daerah tingkat SKPD adalah sebagai berikut :

- a. Bagi pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi tambahan informasi sekaligus bahan evaluasi agar lebih memantapkan peran PPK SKPD yang berperan penting dalam hal penata usahaan keuangan tingkat SKP sehingga memaksimalkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
- b. Memudahkan SKPD khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengolah dan mengintegrasikan seluruh proses penatausahaan keungan tingkat SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

- c. Menghasilkan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabilitas
- d. Bagi penulis penelitian ini merupakan hasil aplikasi serta penerapan langsung dari salah satu analisis yang didapat di bangku kuliah.

1.7. Sistematikan Penulisan Laporan

Untuk memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai materi pokok skripsi ini, penulis membaginya dalam bab – bab yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijabarkan latar belakang masalah yang akan dibahas, perumusan masalah, batasan masalah, metode penelitian yang digunakan, tujuan/manfaat dilakukannya penelitian, dan sistematika penulisan laporan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab Landasan Teori merupakan tinjauan pustaka, menguraikan teori-teori yang mendukung judul, dan mendasari pembahasan secara detail. Landasan teori dapat berupa definisi-definisi atau model yang langsung berkaitan dengan ilmu atau masalah yang diteliti. Pada bab ini juga dituliskan tentang *tools/software* (komponen) yang digunakan untuk pembuatan aplikasi atau untuk keperluan penelitian.

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini berisi antara lain: Tinjauan Umum yang menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian dan data yang dipergunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, berkaitan dengan kegiatan penelitian.

Bab ini point utamanya adalah “analisis masalah”, yang akan menguraikan tentang analisis terhadap permasalahan yang terdapat di kasus yang sedang di teliti. Meliputi analisis terhadap masalah

sistem yang sedang berjalan, analisis hasil solusinya, analisis kebutuhan terhadap sistem yang diusulkan, dan analisis kelayakan sistem yang diusulkan yang kemudian dilanjutkan dengan perancangan sistem.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan paparan implementasi dan analisis hasil uji coba program. Bab ini akan memaparkan hasil-hasil dari tahapan penelitian, dari tahap analisis, desain, implementasi desain, hasil testing dan implementasinya, berupa penjelasan teoritik, baik secara kualitatif, kuantitatif, atau secara statistik. Selain itu, sebaiknya hasil penelitian juga dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu yang sejenis atau keadaan sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan mengemukakan kembali masalah penelitian kemudian menyimpulkan bukti-bukti yang diperoleh dan akhirnya menarik kesimpulan apakah hasil yang didapat (dikerjakan), layak untuk digunakan (diimplementasikan).

Saran merupakan manifestasi dari penulis untuk dilaksanakan.